

RINGKASAN

Nasvin Yuda Mahendra. 2005. **Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Birokrasi (Studi tentang Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah)**, Pembimbing 1 Dr. Abdul Hakim, M.Si., Pembimbing 2 Dr. Suryadi MS.

Implementasi Otonomi Daerah sebagai refleksi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kekuatan memilih (*Discretionary Power*) pada Pemerintah daerah untuk mendesain ulang konsep pembangunan yang dimilikinya. Terkait dengan Undang-undang tersebut, dalam kelembagaan pemerintahan daerah mengisyaratkan terjadi pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang berimplikasi pada beban perubahan tugas dan struktur organisasi pemerintah daerah. Untuk itu perlu dilakukan restrukturisasi organisasi, penataan personil, dan penataan kelembagaan daerah. Restrukturisasi daerah yang dilakukan berdasarkan PP No. 41 tahun 2007 bertujuan untuk membentuk organisasi yang miskin struktur namun memiliki kemampuan yang besar untuk menciptakan kemakmuran. Restrukturisasi ini juga berlaku dan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Semua jumlah perangkat daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PP No. 41 Tahun 2007 termasuk Dinas, Badan/Kantor pengecualian. Pemerintah Kabupaten Malang memiliki 19 Dinas termasuk 1 Dinas Perkecualian dan memiliki 15 Badan/Kantor setelah dilakukan restrukturisasi sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah ini dilakukan sebagai upaya menciptakan *Good Governance* di Pemerintah Kabupaten Malang.

Rumusan masalah yang penulis kemukakan adalah bagaimana restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Malang. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat restrukturisasi dan upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Adapun tujuannya untuk mengetahui dan menganalisa restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Malang., faktor pendukung dan penghambat restrukturisasi serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Teori pendukung yang digunakan adalah Teori kebijakan publik, *Good Governance*, implementasi kebijakan, reformasi administrasi, kelembagaan. Metode yang dipakai adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana fokus penelitiannya antara lain : Tahapan penataan kelembagaan perangkat daerah pada pembahasan eksekutif di Kabupaten Malang, perubahan struktur organisasi yang dilakukan, faktor pendukung dan penghambat restrukturisasi organisasi perangkat daerah serta upaya Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengatasi faktor penghambat tersebut, dengan lokasi penelitian Kantor Pemerintahan Kabupaten Malang, Bagian Organisasi dan situs penelitian di Kabupaten Malang.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi menyebabkan terjadinya pengembangan, pengintegrasian, peningkatan, pembentukan lembaga baru dan penyempurnaan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Malang sehingga terjadi penambahan jumlah Dinas, Badan/Kantor. Adapun faktor

pendukung dari pelaksanaan restrukturisasi ini adalah PP No. 41 Tahun 2007, adanya Tim 41, SDM, Letak geografis, visi-misi dan Kepala Daerah. Sedangkan faktor penghambat antara lain : dana, SDM, sarana dan Prasarana. Dalam mengatasi faktor penghambat ini banyak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang yaitu melakukan ifisiensi pada penggunaan dana, anggaran, melakukan kompetensi jabatan, diklat jabatan dan pemenuhan secara bertahap kebutuhan akan sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penulis memberikan saran bahwa restrukturisasi perangkat daerah harus dilaksanakan secara terus menerus untuk menghasilkan struktur oeganisasi yang ideal sebagai upaya pencapaian *Good Governance* di Pemerintah Kabupaten Malang, meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah sebagai konsekuensi dari struktur organisasi yang dibentuk, harus diikuti dengan kebijakan pengkoordinasian yang baik, profesional dan yang tidak kalah penting adalah penyempurnaan dalam proses penilaian untuk membentuk struktur organisasi baru sehingga bisa dinilai secara jelas tetapi akan secara objektivitas.



SUMMARY

Nasvin Yuda Mahendra, 2005. **Policy Implementation of Bureucracy Reorganization (a Study on Bureucracy Reorganization of the Malang Regency Based on of Government Regulation Number 41 of 2007 on Local Organization)**, Academic Supervisor Dr. Abdul Hakim, M.Si., Co. Supervisor Dr. Suryadi, MS.

The implementation of Local Autonomy for a reflection of law Number 32 of 2004 provides discretionary power to the local government to redesign its development concept. This Law signs the delegation from the central government to the local government, implying to the local government bearing on changing task and organizational structure. Organizational reorganization, therefore, becomes important. Local reorganization in compliance with Government Regulation No. 41 of 2007 aims at establishing small organization with more capability to ensure the prosperity. Such restructuring also prevails at and comes into consideration by the Government of Malang Regency. All local officers worked for the Government of Malang Regency accaccounting with Government Regulation Number 41 of 2007 including Official, Agency/Office. Organizational reorganization for local officer represents a step to produce Good Governance in the Government of Malang Regency.

Problems determined by the author involve: How suppose to conduct organizational reorganization for local officers at Malang Regency?; What become the same factors of reorganization?; and What measures have been taken by the Government of Malang Regency to deal with the constraining factors? The objective of this research seems to acknowledge and to analyze organizational reorganization for local officers in the Government of Malang Regency. The supporting theories include public policy, policy implementation, administration reformation, and organization. The method employs descriptive study with qualitative approach. Research focuses on: the stage of management of local officer organization during executive discussion at Malang Regency, the change of organization structure, the supporting and constraining factors of organizational reorganization for local officer, and measures taken by the Government of Malang Regency to deal with this constraining factor. Research locates at the Office of the Government of Malang Regency, Division of Organization. Research site has been at Malang Regency.

Results of research indicate that the reorganization stimulates the development, the integration, the improvement, the establishment of new organization, and the perfection of local officer reorganization at Malang Regency. These several actions lead to the additional officials, agencies and offices. The supporting factors of this reorganization may be Government Regulation Number 41 of 2007, the establishment of Team 41, human resource, geographic location, vision-mission, and Local Leader. The constraining factors will be fund, human resource, structure and infrastructure. The Government of Malang Regency has taken several

measures to deal with this constraining factor, by ascertaining efficiency in the use of fund and budget, ensuring job competence, conducting job education and training, and gradually meeting the demand of structure and infrastructure.

Taking account the results of research and conclusion, research may suggest that the reorganization for local officer should be conducted in sustainable manner to produce ideal organization structure in order to achieve *Good Governance* in the Government of Malang Regency, to improve the professionalism of government officer as a consequence from established organizational structure, and to develop a professionally favorable coordination policy.

